

Buletin APBN

Vol. VI, Edisi 23, Desember 2021

**Tinjauan Bantuan Subsidi Upah
bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Non-PNS**

p. 3

**Transformasi Digital Perbankan
dan Dampaknya Terhadap
Perekonomian**

p. 8

**Progres dan Evaluasi
Pembangunan Jalan Trans Papua**

p. 12



Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum
Ade Nurul Aida
Ervita Luluk Zahara

Editor

Marihot Nasution
Riza Aditya Syafri
Satrio Arga Effendi

Tinjauan Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS

p.3

SEKTOR pendidikan tidaklah luput dari dampak akibat adanya pandemi Covid-19. Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terhenti dan pengurangan jam ajar demi menekan penyebaran virus Covid-19 berimbas pada menurunnya pendapatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), terutama yang berstatus sebagai non-PNS. Merespon hal tersebut, Pemerintah berinisiatif memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada PTK non-PNS baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Meski kebijakan ini patut diapresiasi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan diantaranya yaitu skema pencairan yang kontradiktif dengan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, rendahnya sosialisasi atas program yang dijalankan, serta melakukan perbaikan data.

p.8

Transformasi Digital Perbankan dan Dampaknya Terhadap Perekonomian

TRANSFORMASI perbankan menuju digital perbankan dapat dikatakan sudah pasti akan terjadi, dilihat dari pesatnya perkembangan transaksi digital, serta langkah yang diambil OJK terkait arah perbankan ke depannya. Dilihat dari dampaknya, perbankan digital akan mampu meningkatkan jangkauan akses perbankan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi perbankan sehingga akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Namun, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam transformasi menuju digital perbankan, yakni terkait pemerataan akses internet di Indonesia, keamanan siber, dan ketenagakerjaan.

Progres dan Evaluasi Pembangunan Jalan Trans Papua

p.12

PEMERINTAH terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Membangun sistem jaringan jalan yang bertahun-tahun belum terbangun menjadi salah satu infrastruktur utama yang akan dibangun oleh pemerintah yaitu dengan pembangunan jalan Trans Papua. Namun dalam proses berjalannya pembangunan tersebut, masih ditemui beberapa kendala, seperti topografi yang ekstrim, pembangunan yang hanya menghubungkan jalan antara kabupaten dan kota, serta daerah yang masih dilanda konflik sehingga mengancam para pekerja.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Tinjauan Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS

oleh

Savitri Wulandari*)

Arjun Rizky Mahendra**)

Abstrak

Sektor pendidikan tidaklah luput dari dampak akibat adanya pandemi Covid-19. Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terhenti dan pengurangan jam ajar demi menekan penyebaran virus Covid-19 berimbas pada menurunnya pendapatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), terutama yang berstatus sebagai non-PNS. Merespon hal tersebut, pemerintah berinisiatif memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada PTK non-PNS baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Meski kebijakan ini patut diapresiasi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan diantaranya yaitu skema pencairan yang kontradiktif dengan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, rendahnya realisasi bantuan, serta indikasi bantuan tidak tepat sasaran. Berdasarkan beberapa catatan tersebut, ke depannya pemerintah melalui Kemendikbud diharapkan melakukan evaluasi atas skema penyaluran bantuan, meningkatkan sosialisasi atas program yang dijalankan, serta melakukan perbaikan data.

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor, tak terkecuali sektor pendidikan.

Upaya pengendalian penyebaran virus Covid-19 memaksa kegiatan belajar mengajar reguler di sekolah untuk dihentikan sementara. Sekolah dianggap sebagai salah satu media yang berpotensi memperluas penyebaran Covid-19 karena adanya interaksi secara langsung antara murid dan guru dalam jarak yang dekat. Penutupan semua lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi tersebut memaksa kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah diiringi dengan waktu pembelajaran yang berkurang.

Proses pendidikan yang terhenti dan berkurangnya jam ajar menimbulkan risiko hilangnya pendapatan dan menyebabkan tekanan yang besar bagi PTK terutama bagi mereka yang berstatus non-PNS. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi

PTK dengan meluncurkan program BSU bagi PTK non-PNS di lingkungan Kemendikbud yang terdampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, tulisan ini akan meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BSU PTK di lingkungan Kemendikbud.

Kebijakan BSU PTK

BSU PTK adalah bantuan pemerintah sejumlah Rp1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (non-PNS). Pemberian BSU PTK ditujukan untuk melindungi PTK non-PNS dari pelemahan ekonomi akibat terganggunya aktivitas belajar mengajar karena pandemi. Anggaran program BSU PTK bersumber dari APBN melalui bagian anggaran Kemendikbud sebesar Rp3,6 triliun. Pedoman pelaksanaan teknis penyaluran BSU PTK diatur melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: savitri.wulandari@dpr.go.id*

**) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: arjunrizky000@gmail.com*

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran (TA) 2020.

BSU PTK dirancang untuk disalurkan kepada 2.034.732 orang, dengan rincian 162.277 dosen non-PNS pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, dan 237.623 tenaga kependidikan (tenaga perpustakaan, laboratorium, dan administrasi sekolah). Data terkait PTK diperoleh dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di bawah pengelolaan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) di bawah pengelolaan Ditjen Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dengan *cut off* per tanggal 30 Juni 2020. Data tersebut kemudian dilakukan penyaringan untuk memperoleh PTK non-PNS sebelum dilakukan verifikasi dengan data penerima program Kartu Prakerja dan BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada penerima yang menerima bantuan ganda. Oleh sebab itu, terdapat syarat bahwa penerima yang berhak mendapatkan BSU PTK ini tidak terdaftar sebagai penerima BSU dari kementerian lain. Adapun syarat lainnya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BSU PTK adalah: 1) Warga Negara Indonesia (WNI); 2) berstatus sebagai PTK non-PNS; 3) terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per 30 Juni 2020; 4) memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

PTK yang memenuhi persyaratan akan dibuatkan rekening baru dan diwajibkan untuk mendatangi cabang bank penyalur untuk mengaktifasi rekening

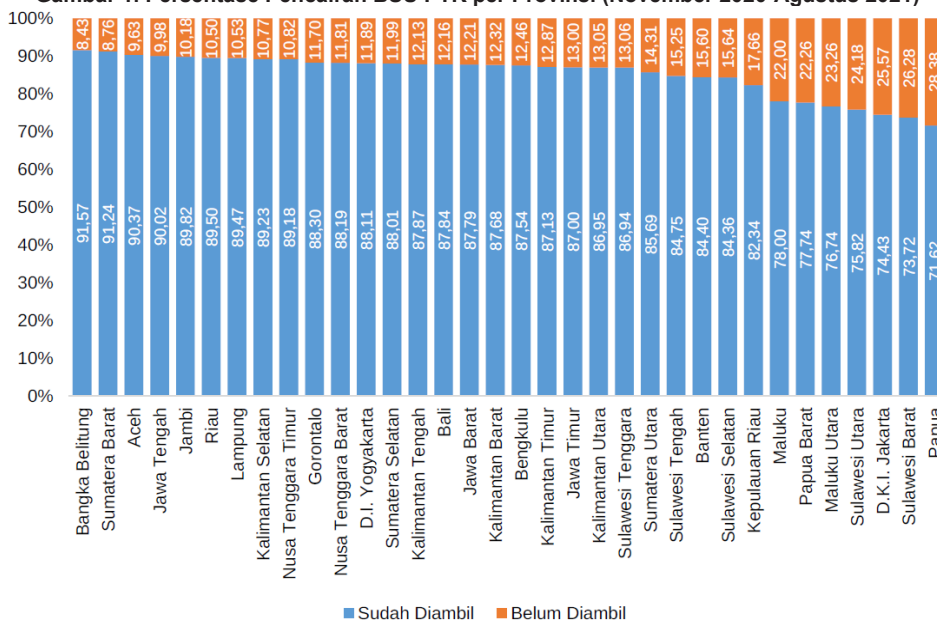
guna melakukan pencairan bantuan. BSU PTK disalurkan secara bertahap mulai bulan November 2020 dan PTK diberikan waktu hingga bulan Juni 2021 untuk melakukan aktivasi rekening bantuan dengan membawa dokumen persyaratan yang ditentukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keputusan Penerima BSU Kemendikbud yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, serta SPTJM yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangani.

Tinjauan Realisasi dan Evaluasi Program BSU PTK

Terdapat beberapa catatan atas kebijakan BSU bagi PTK non-PNS di lingkungan Kemendikbud antara lain:

Pertama, skema penyaluran dan pencairan bantuan kontradiktif terhadap upaya menekan penyebaran Covid-19. Mekanisme penyaluran bantuan melalui pembukaan rekening baru dan pencairan BSU PTK yang mewajibkan penerima bantuan untuk datang langsung ke bank menyebabkan munculnya potensi kerumunan. Pembatasan jumlah layanan perbankan per hari dan pembatasan jumlah orang dalam ruangan membuat waktu tunggu untuk mendapatkan layanan menjadi bertambah. Hal ini sangat tidak efektif menimbang sebagian penerima telah memiliki rekening. Terlebih lagi bank penyalur tidak hanya menyalurkan BSU PTK, tetapi juga menyalurkan program bantuan subsidi pemerintah lainnya, sehingga menimbulkan potensi kerumunan yang masif. Penelitian yang dilakukan oleh Amri (2021) menemukan fakta bahwa mayoritas sampel terpilih menghabiskan waktu rerata 3-6 jam untuk mendapatkan layanan bantuan subsidi pemerintah. Ketakutan akan terpapar virus dan lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan layanan juga dapat menjadi faktor yang meningkatkan keengganan penerima bantuan untuk datang ke bank dan melakukan pencairan BSU PTK.

Gambar 1. Persentase Pencairan BSU PTK per Provinsi (November 2020-Agustus 2021)



Sumber: Ditjen GTK, Kemendikbud, 2021 (diolah)

Kedua, rendahnya pencairan bantuan yang dilakukan oleh PTK. Pada awal perencanaannya, PTK diberikan waktu untuk melakukan aktivasi rekening bantuan dan menerima BSU mulai November 2020 hingga 30 Juni 2021. Namun, hingga periode aktivasi rekening berakhir, tercatat pencairan yang dilakukan hanya mencapai 71,42 persen bagi pendidik dan 68,43 persen bagi tenaga kependidikan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa aktivasi rekening bantuan. Per Agustus 2021, realisasi pencairan BSU ialah sebesar 87,44 persen bagi pendidik dan 83,95 persen bagi tenaga kependidikan.

Dari data yang diperoleh dari Ditjen GTK Kemendikbud, didapat informasi bahwa alokasi anggaran program BSU bagi guru dan tenaga kependidikan secara nasional adalah sebesar Rp3,38 triliun dengan penyerapan sebesar Rp2,94 triliun atau 87 persen dari alokasi anggaran. Penyerapan tertinggi berasal dari Provinsi Bangka Belitung dan terendah Provinsi Papua (Gambar 1). Dilihat berdasarkan wilayah, Maluku-Papua memiliki penyerapan yang rendah dibandingkan dengan wilayah lain yaitu hanya 75 persen.

Jika ditelaah lebih detail dengan membandingkan antara proporsi alokasi anggaran yang diterima oleh PTK per provinsi dengan keterserapan anggarannya, terlihat bahwa terdapat 5 provinsi dengan alokasi anggaran BSU PTK tinggi namun memiliki keterserapan yang rendah. Lima provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta (Gambar 2).

Ketiga, indikasi bantuan salah sasaran. Kemendikbud tidak dapat memperoleh informasi akurat mengenai besarnya total penghasilan dari PTK non-PNS. Hal ini disebabkan karena Dapodik sebagai instrumen pengumpulan data tidak memuat data terkait penghasilan PTK. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tidak dapat diketahui apakah penerima BSU PTK benar-benar memenuhi kriteria PTK non-PNS yang memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta atau tidak.

Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dirilis oleh BPK (2020) juga diketahui bahwa terdapat 221.717 PTK yang telah ditetapkan sebagai penerima BSU ternyata ditetapkan juga sebagai penerima

Gambar 2. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran BSU PTK per Provinsi (November 2020-Agustus 2021)



Sumber: Ditjen GTK, Kemendikbud, 2021 (diolah).

tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, maupun sertifikasi dosen pada TA 2020 sebagaimana dengan rincian berikut: 1) 12.482 orang dalam SK penerima BSU merupakan penerima tunjangan khusus guru TA 2020; 2) 174.623 orang dalam SK penerima BSU merupakan penerima tunjangan profesi guru TA 2020; 3) 34.612 orang dalam SK penerima BSU merupakan penerima tunjangan sertifikasi dosen.

Hal tersebut merupakan indikasi pemberian BSU tidak tepat sasaran karena penerima berpotensi memiliki penghasilan lebih dari Rp5 juta karena telah mendapatkan tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru atau tunjangan profesi untuk dosen.

Daftar Pustaka

Amri, Lala Hucadionta Ainul, dan Whan Augustin Ainul Amri. 2021. Eklporasi Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tenaga Kependidikan Non-PNS Selama Pandemi Covid-19.

BPK. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Program Bantuan Kuota Internet dan Bantuan Subsidi Upah/Gaji Tahun Anggaran 2020 Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi Terkait Lainnya.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2021. Data Rekap Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS yang disampaikan kepada penulis pada tanggal 22 November 2021.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2020. Buku Saku Tanya Jawab Seputar Bantuan Subsidi Upah (BSU) Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Di Lingkungan Kemendikbud.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2020. Bahan

Rekomendasi

Catatan atas pelaksanaan program BSU PTK diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan masukan bagi pelaksanaan program serupa di masa mendatang. Maka dari itu, berdasarkan paparan yang telah diungkap pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan Pemerintah seperti sebagaimana berikut: **pertama**, mengevaluasi skema penyaluran dan pencairan bantuan di masa pandemi Covid-19. Kebijakan yang dilaksanakan hendaknya tidak bertentangan dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Pemerintah dapat melibatkan lebih banyak penyalur dalam mekanisme penyaluran bantuan misalnya dengan bekerja sama dengan bank swasta, PT Pos Indonesia, ataupun komunitas. Selain itu, Kemendikbud juga dapat menyiapkan skema pencairan menggunakan fasilitas perbankan digital maupun penyaluran langsung ke tempat tinggal penerima. **Kedua**, meningkatkan sosialisasi. Pemerintah harus lebih masif dalam menyosialisasikan programnya baik melalui media cetak maupun media massa sehingga setiap penerima bantuan dapat terinformasi dengan baik. **Ketiga**, melakukan perbaikan sistem pendataan PTK pada tiap jenjang pendidikan. Pemerintah dapat mulai mengumpulkan dan mengolah data terkait penghasilan PTK sehingga tingkat kesejahteraan PTK dapat terpetakan.

Paparan Peluncuran BSU PTK Non-PNS.

Tempo. 2021. Aktivasi Bantuan Subsidi Upah PTK Non-PNS Diperpanjang.

Diakses melalui <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/466369/aktivasi-bantuan-subsidi-upah-ptk-non-pns-diperpanjang> pada tanggal 24 November 2021.

Transformasi Digital Perbankan dan Dampaknya Terhadap Perekonomian

oleh

Riza Aditya Syafri*)

Abstrak

Transformasi perbankan menuju digital perbankan dapat dikatakan sudah pasti akan terjadi, dilihat dari pesatnya perkembangan transaksi digital, serta langkah yang diambil OJK terkait arah perbankan ke depannya. Dilihat dari dampaknya, perbankan digital akan mampu meningkatkan jangkauan akses perbankan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi perbankan sehingga akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Namun, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam transformasi menuju digital perbankan, yakni terkait pemerataan akses internet di Indonesia, keamanan siber, dan ketenagakerjaan.

Perbankan memiliki peranan penting sebagai intermediasi keuangan yang mengelola arus perputaran uang hampir di seluruh dunia. Namun, pesatnya perkembangan teknologi digital dan transaksi digital menjadi ancaman bagi perbankan. Secara total, transaksi digital di seluruh dunia sejak tahun 2017 – 2021 tumbuh sebesar 118 persen, dari USD 3,09 triliun pada tahun 2017 menjadi USD 6,75 triliun pada tahun 2021 (Statista, 2021). Di Indonesia sendiri, perkembangan transaksi digital tumbuh jauh lebih tinggi, yakni sebesar 1.556 persen dalam kurun tahun 2017 – 2020. Total transaksi elektronik di Indonesia tahun 2017 hanya sebesar Rp12,37 triliun, dan naik menjadi Rp204,9 triliun di tahun 2020 (Bank Indonesia, 2020).

Tingginya pertumbuhan transaksi digital di seluruh dunia, pandemi Covid-19 yang mendorong akselerasi digital, dan perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital, mengakibatkan perbankan mau tidak mau harus segera mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan digital. Transformasi perbankan digital di Indonesia sendiri telah dimulai sejak tahun 2016, dipelopori oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang mengeluarkan Jenius. Kemudian

diikuti oleh Bank Bukopin dan Bank DBS Indonesia di tahun 2018 yang mengeluarkan Wokee dan Digi Bank. Selanjutnya di tahun 2020 terdapat Bank UOB yang membuat TMRW. Hingga kini, berbagai perbankan besar lainnya telah mulai mengembangkan perbankan digital mereka seperti Bank BCA, Bank Mega, dan lainnya.

Secara konsep, terdapat perbedaan antara bank digital dengan bank konvensional yang menyediakan layanan digital seperti *mobile banking* dan *internet banking*. Bank digital umumnya dapat melakukan semua aktivitas perbankan mulai dari pembukaan akun, transfer, deposito, hingga penutupan akun melalui *smartphone*/perangkat elektronik, tanpa perlu hadir secara fisik ke bank. Selain itu, perbedaan paling mendasar lainnya adalah bank digital umumnya tidak memiliki kantor fisik (selain kantor pusat), atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2021). Sementara bank konvensional yang menyediakan layanan digital, umumnya belum mampu menyediakan semua layanannya secara digital. Selain itu, bank konvensional identik dengan jumlah kantor cabang yang sangat banyak.

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: riza.syafri@dpr.go.id

Dilihat dari jenisnya, bank digital di Indonesia dapat diklasifikasi menjadi tiga jenis. **Pertama**, bank konvensional yang mendirikan dan membangun bank digital, seperti Jenius, Wokee, dan Digi Bank. **Kedua**, bank konvensional yang mengakuisisi bank Buku 1 dan Buku 2, yang selanjutnya ditransformasi menjadi bank digital, seperti yang dilakukan Bank BCA yang mengakuisisi Bank Royal dan dijadikan Bank Digital BCA. Maupun Mega Corpora (induk *company* dari Bank Mega) yang mengakuisisi Bank Harda Internasional, dan akan ditransformasi menjadi bank digital. **Ketiga**, pendirian bank baru yang benar-benar secara digital, atau yang biasa disebut sebagai neo bank, seperti Bank Jago maupun Bank Neo Commerce.

Bagaimanapun, transformasi perbankan menjadi bank digital telah menjadi suatu keniscayaan. Hal tersebut terlihat dari adanya *blueprint* transformasi digital perbankan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai aturan turunan OJK lainnya. Oleh karenanya, dalam tulisan ini ingin melihat bagaimana dampak dari transformasi perbankan menuju digital terhadap perekonomian.

Dampak Transformasi Perbankan Menuju Bank Digital

Dilihat dari potensi dampak positif yang akan muncul dari transformasi digital yang dilakukan oleh perbankan, setidaknya terdapat dua potensi dampak positif yang paling signifikan yang mungkin muncul akibat hal tersebut.

Pertama, meluasnya aksesibilitas perbankan. Berdasarkan hasil kajian Bain, Google, dan Temasek pada tahun 2019, mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 92 juta jiwa masyarakat di Indonesia yang belum mendapatkan akses perbankan (*unbanked*). Jumlah tersebut sekitar 51 persen dari total penduduk usia produktif di Indonesia. Salah satu penyebab tingginya masyarakat yang masih *unbanked* adalah akses infrastruktur yang terbatas di sejumlah wilayah, sehingga sulit

bagi lembaga keuangan untuk dapat membangun cabang di sejumlah daerah (Bain, Google, Temasek, 2019).

Dalam kajian Bain, Google, dan Temasek tahun 2019 tersebut juga menyebutkan bahwa perbankan digital memiliki potensi untuk dapat mengatasi permasalahan yang menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap perbankan. Kehadiran bank digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan perbankan sepenuhnya melalui *smartphone*, mulai dari pembukaan akun, hingga aktivitas perbankan lainnya, hanya cukup menggunakan akses internet, tanpa membutuhkan layanan secara fisik, dianggap akan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan perbankan, terutama pada masyarakat di daerah yang selama ini sulit dijangkau perbankan.

Kedua, meningkatkan daya saing perbankan Indonesia. Dilihat dari tingkat efisiensi operasional perbankan di Indonesia yang tercermin dari Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dapat dikatakan efisiensi perbankan Indonesia masih cukup rendah. Berdasarkan data OJK beberapa tahun terakhir, BOPO terendah bank umum Indonesia ada di angka 73,74 persen pada Oktober 2013. Tren BOPO perbankan Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2021, BOPO bank umum di Indonesia berada di angka 83,69 persen. Sebagai perbandingan, rata-rata BOPO perbankan ASEAN lainnya berada pada kisaran 30-40 persen (Berita Satu, 2021). Implikasi dari tingginya BOPO perbankan Indonesia adalah tingkat bunga kredit perbankan Indonesia yang sangat tinggi. Rata-rata bunga kredit bank di Indonesia sekitar 10,4 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (7,7 persen), Filipina (7,1 persen), Malaysia (4,9 persen), dan Thailand (4,1 persen) (Berita Satu, 2021).

Transformasi perbankan menuju digital, dianggap akan meningkatkan efisiensi perbankan dengan menurunkan biaya operasional perbankan secara signifikan. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), hadirnya bank digital yang tidak memerlukan kantor cabang, tentunya akan menurunkan BOPO perbankan. Meningkatnya efisiensi perbankan tersebut juga akan berdampak terhadap penurunan suku bunga yang jauh lebih kompetitif (CNBC Indonesia, 2021). Menurunnya tingkat suku bunga perbankan, tentunya akan mendorong peningkatan kredit, baik kredit konsumsi, kredit investasi, maupun kredit modal kerja, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya aktivitas perekonomian, diharapkan juga dapat meningkatkan penerimaan perpajakan khususnya melalui transaksi digital.

Dilihat dari dampak positifnya terhadap perekonomian, maka transformasi perbankan menuju digital perlu didorong. Namun, ada beberapa hal yang mungkin juga perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun otoritas yang mengatur perbankan jika transformasi perbankan digital ini akan segera diimplementasikan. **Pertama**, kesiapan infrastruktur internet. Layanan perbankan digital tentunya akan sangat bergantung dari perkembangan internet di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020, masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan internet, dimana 9.113 daerah adalah daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan 3.435 daerah non 3T. Selain itu, dilihat dari sebaran pengguna internet di Indonesia juga belum merata, dimana 55,7 persen berada di Jawa, 21,6 persen di Sumatera, 10,9 persen di Sulawesi, Maluku, dan Papua, 6,6 persen di Kalimantan, dan 5,2 persen di Bali-Nusa Tenggara (Kominfo, 2020). Artinya, akses internet di Indonesia

saat ini belum sepenuhnya merata. Pemerataan akses internet ke seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu syarat untuk mendorong suksesnya transformasi perbankan digital di Indonesia.

Kedua, risiko keamanan siber di Indonesia. Transformasi menuju perbankan digital artinya bahwa layanan perbankan akan sangat bergantung terhadap akses internet. Oleh karena itu, keamanan siber di Indonesia perlu menjadi perhatian. Berdasarkan data dari Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, terjadi kenaikan serangan siber dari 228 juta serangan siber di tahun 2019, menjadi 495 juta di tahun 2020, atau meningkat 5 kali lipat. Selain itu, dilihat dari industrinya, industri layanan keuangan menjadi salah satu yang paling sering terkena serangan siber (17 persen), diikuti oleh industri retail (16 persen), dan transportasi (10 persen) (Pratiwi & Fitri, 2021).

Ketiga, implikasi transformasi perbankan digital terhadap penyerapan tenaga kerja di industri perbankan. Perbankan digital identik dengan jumlah kantor cabang fisik yang sangat minim. Transformasi menuju perbankan digital tentunya akan mengurangi jumlah kantor cabang perbankan secara signifikan. Implikasinya adalah jumlah lapangan pekerjaan akan menurun, dan berpotensi akan meningkatkan pengangguran.

Sebagai gambaran, jumlah tenaga kerja di industri jasa keuangan pada Februari 2020 berdasarkan data BPS sebesar 1,82 juta jiwa, menurun sebesar 16,82 persen pada Februari 2021 menjadi 1,51 juta jiwa. Selain disebabkan oleh pandemi Covid-19, penurunan jumlah tenaga kerja di industri perbankan juga sejalan dengan jumlah kantor cabang perbankan yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data OJK tahun 2021, jumlah kantor cabang bank umum menurun dari 32.953 unit di tahun 2015, menjadi 30.733 unit di tahun 2020, atau

menurun sebanyak 2.200 cabang dalam 6 tahun terakhir. Sementara dari awal tahun 2021 hingga Juni 2021, jumlah kantor cabang perbankan kembali turun menjadi 29.661 unit, atau dengan kata lain terjadi penutupan sekitar 1.072 cabang hanya dalam waktu 6 bulan. Transformasi perbankan menuju digital tentunya akan mengakibatkan jumlah kantor cabang terus mengalami penurunan ke depan, dan berimbas terhadap serapan tenaga kerja. Menurunnya serapan tenaga kerja akan berpotensi meningkatkan pengangguran dan kemiskinan, yang akan berdampak juga terhadap peningkatan beban dalam APBN melalui porsi belanja bantuan sosial.

Daftar Pustaka

Bain, Google, Temasek (2019). E-Conomy SEA 2019 Report.

Bank Indonesia. (2021). Statistik Sistem Pembayaran Transaksi Uang Elektronik. Diakses pada: <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/uang-elektronik-transaksi.aspx>

Berita Satu. (2021). Bunga Kredit Bank Indonesia Tertinggi di Asean. Diakses pada: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/857401/bunga-kredit-bank-indonesia-tertinggi-di-asean>

CNBC Indonesia. (2021). Positif ke Ekonomi, Bank Digital Bikin Orang Banyak Belanja. Diakses pada: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210301152254-37-226953/positif-ke-ekonomi-bank-digital-bikin-orang-banyak-belanja>

Kominfo. (2020). Lebih dari 11 Ribu Desa Wilayah 3T Sudah Terjangkau Jaringan 4G. Diakses pada: https://www.kominfo.go.id/content/detail/27042/lebih-dari-11-ribu-desa-wilayah-3t-sudah-terjangkau-jaringan-4g/0/berita_satker

OJK. (2021). Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. OJK: Jakarta.

OJK. (2021). Statistik Perbankan Indonesia berbagai edisi. Diakses pada: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/default.aspx>

Pratiwi, D.R. & Fitri, Hikmatul. (2021). Bangkitnya Era Bank Digital di Indonesia: Prospek dan Tantangan. Pusat Kajian Anggaran: Jakarta.

Statista. (2021). Worldwide Digital Payment Data. Diakses pada: <https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/digital-payments/worldwide#transaction-value>.

Rekomendasi

Dilihat dari potensi dampak positif dari adanya transformasi digital perbankan terhadap perekonomian, maka transformasi tersebut perlu didukung dan mendapat perhatian serius. Namun, untuk dapat mendorong potensi positif tersebut, para *stakeholders* (pemerintah, BI, OJK, dan industri perbankan) juga perlu menyiapkan skema untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin muncul akibat transformasi digital perbankan tersebut, diantaranya: **pertama**, pemerintah perlu meningkatkan *coverage* dan pemerataan akses internet di Indonesia. Hal tersebut dapat didorong dan dipercepat dengan melibatkan sektor swasta dengan memberikan insentif fiskal maupun non fiskal untuk mendorong minat sektor swasta. **Kedua**, pemerintah perlu mendorong peningkatan keamanan siber di Indonesia, baik melalui penerbitan maupun penguatan berbagai regulasi terkait keamanan siber, regulasi terkait keamanan data pribadi nasabah, maupun pemanfaatan *tools* dan teknologi yang dapat meningkatkan keamanan siber Indonesia. **Ketiga**, baik pemerintah, OJK, maupun industri perbankan, perlu menyiapkan alternatif solusi bagi para tenaga kerja yang mungkin akan terdampak akibat penutupan kantor cabang ke depannya. Hal tersebut perlu dilakukan agar tingkat pengangguran tidak meningkat.

Progres dan Evaluasi Pembangunan Jalan Trans Papua

oleh

Teuku Hafizh Fakhreza*)

Dwi Resti Pratiwi**)

Abstrak

Pemerintah terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Membangun sistem jaringan jalan yang bertahun-tahun belum terbangun menjadi salah satu infrastruktur utama yang akan dibangun oleh pemerintah yaitu dengan pembangunan jalan Trans Papua. Namun dalam proses berjalannya pembangunan tersebut, masih ditemui beberapa kendala, seperti topografi yang ekstrim, pembangunan yang hanya menghubungkan jalan antara kabupaten dan kota, serta daerah yang masih dilanda konflik sehingga mengancam para pekerja.

Pembangunan Jalan Trans Papua (JTP) merupakan salah satu proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta merupakan *Major Project* dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Tujuan dari pembangunan Proyek JTP yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui akses serta konektivitas antar wilayah dan menyambung sentra - sentra perekonomian yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi. Pembangunan JTP juga diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan serta pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam mendukung proyek pembangunan JTP tersebut, pada tahun 2015 pemerintah telah menganggarkan sebanyak Rp3,7 triliun melalui dana dalam APBN. Kemudian di tahun 2016 pemerintah kembali menganggarkan sebesar Rp2,6 triliun, dan di tahun 2017 dianggarkan hingga sebesar Rp3,4 triliun. Sementara pada tahun 2020 pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan sebesar Rp2,9 triliun yang ditujukan untuk pembukaan lahan dan jalan perbatasan JTP. Di tahun 2021 juga kembali dialokasikan melalui Kementerian PUPR sebesar Rp9,94 triliun untuk membangun infrastruktur di Papua dan Papua Barat, serta sebesar Rp7,15 triliun dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan (Provinsi Papua senilai Rp4,49 triliun dan Provinsi Papua Barat senilai Rp2,66 triliun). Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini kemudian akan membahas lebih lanjut mengenai progres pembangunan JTP, potensi yang akan dihasilkan, maupun evaluasi terkait pembangunan JTP tersebut.

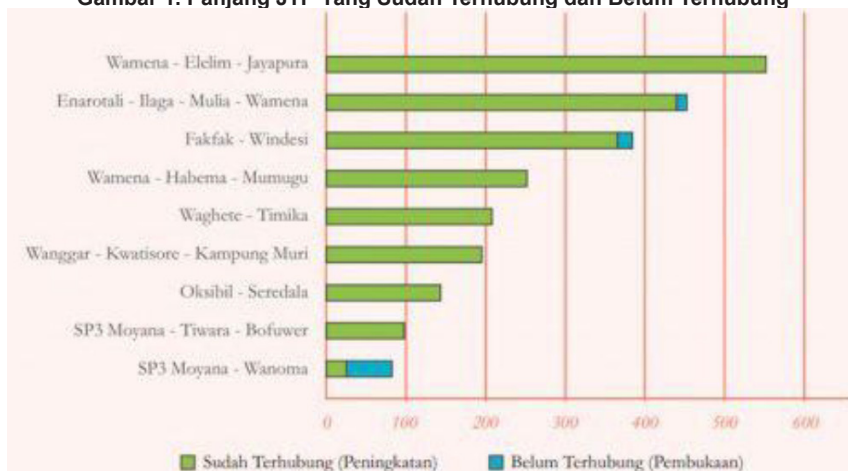
Progres dan Potensi Pembangunan Jalan Trans Papua

Proyek pembangunan JTP yang berada di Provinsi Papua memiliki panjang mencapai 2.902 km. Dimana JTP Provinsi Papua tersebut meliputi ruas Jalan Merauke-Tanah Merah-Waropko (543 km), Waropko-Oksibil (136 km), Dekai-Oksibil (225 km), Kenyam-Dekai (180 km), Wamena-Habema-Kenyam-Mamug (295 km), Jayapura-Elelim-Wamena (585 km), Wamena-Mulia-Ilaga-Enarotali (446 km), Wagete-Timika sepanjang (196 km), serta Enarotali-

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: teukuhafizhfakhreza@gmail.com

***) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: dwi.pratiwi@dpr.go.id

Gambar 1. Panjang JTP Yang Sudah Terhubung dan Belum Terhubung



Sumber: Data CIFOR (2021), diolah.

Wagete-Nabire (285 km). Sedangkan di Provinsi Papua Barat, JTP dibagi menjadi dua segmen yaitu, Sorong-Manokwari sepanjang 547,81 km dan Manokwari-Batas Provinsi Papua Barat sepanjang 524 km. Hingga saat ini pemerintah telah membangun JTP sepanjang 3.446 km dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km.

Pada Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi JTP sudah terbuka dan terhubung. Dari sembilan ruas JTP, tiga ruas jalan telah terhubung sepenuhnya, yakni ruas Moyana-Tiwara-Bofuwer, Wanggar Kwatisore-Kp. Muri, dan Wamena-Elelim-Jayapura. Sementara enam ruas jalan masih belum terhubung. Sebagian besar kondisi JTP di tiga ruas tersebut masih berupa pengerasan tanah. Jalan yang sudah diaspal sebagian besarnya berada di wilayah perkotaan. Lebar jalannya beragam berkisar dari 9 meter hingga 15 meter. Secara keseluruhan pembangunan JTP akan difokuskan pada pembukaan pada ruas – ruas yang belum terhubung, pengerasan jalan tanah, dan pengaspalan pada ruas JTP di sekitar perkotaan.

Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (2021), Provinsi Papua (26,86 persen) dan Papua Barat (21,84 persen), merupakan provinsi yang memiliki persentase jumlah penduduk miskin tertinggi diantara provinsi lainnya

di Indonesia. Untuk itu, dengan adanya pembangunan JTP yang telah membuka jalur logistik dari Kota Jayapura menuju Wamena, serta menghubungkan sejumlah kabupaten di pegunungan tengah Papua (Yalimo, Jayawijaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak (Sinak-Ilaga), Lanny Jaya, Memberamo Tengah, Nduga hingga Mbua), tentunya diharapkan menjadi jawaban turunnya angka kemiskinan dan harga kebutuhan pokok di Papua. Karena selama ini pengiriman logistik bahan - bahan pokok maupun beberapa komoditas unggulan (sagu, ubi jalar, kakao, dan kopi) dikirim melalui jalur udara yang mengakibatkan harga menjadi jauh lebih mahal. Selain itu, keberadaan JTP juga diharapkan menjadi gairah baru dalam bangkitnya industri di Papua, seperti bisnis angkutan logistik antar kabupaten kota, karena adanya JTP dapat memangkas waktu distribusi barang dan harga bahan pokok dan logistik lainnya menjadi terjangkau.

Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Provinsi Papua dan Papua Barat

Provinsi	Indeks Kemahalan Konstruksi		
	2019	2020	2021
Papua	218,59	208,90	207,11
Papua Barat	132,67	129,66	130,59

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah.

Kemudian dari Tabel 1 di atas, terlihat bahwa meskipun sempat terjadi kenaikan IKK di Provinsi Papua pada tahun 2021 sebagai akibat kontraksi dari pandemi. Namun secara umum dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat, IKK-nya

memiliki tren penurunan seiring semakin panjang JTP yang bisa dilalui.

Kendala Pembangunan Trans Papua

Dalam pembangunan proyek JTP, selain melihat dampak positif dan potensi yang akan dihasilkan, pemerintah juga tidak dapat mengesampingkan kendala dan potensi dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat dari adanya pembangunan JTP itu sendiri, antara lain:

Pertama, ketersediaan anggaran yang tidak sedikit untuk merampungkan pembangunan JTP yang membentang dari Sorong sampai Merauke. Pemerintah perlu memperhatikan kualitas pengaspalan dan memenuhi kriteria keamanan untuk pengendara, karena JTP ke depan akan berfungsi sebagai koneksi untuk kendaraan-kendaraan logistik dan kendaraan bermuatan besar. Topografi yang ekstrim, juga berpotensi mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit dalam membiayai transportasi peralatan konstruksi untuk proses pembangunan tersebut. Jika dibandingkan dengan pembangunan Tol Trans Sumatera, ruas JTP memiliki medan jalan yang jauh lebih besar mengingat hutan yang dilewati sangat minim hutan produksi seperti pada pembangunan Trans Sumatera, sehingga mengakibatkan kontraktor harus lebih berhati-hati dan mengakibatkan anggaran yang dikeluarkan dapat berkali-kali lipat. Menteri PUPR (2020) menyebutkan bahwa pembangunan JTP ini sangat bergantung dengan seberapa cepat dan besar anggaran yang dikeluarkan. Dalam pembangunan 1 km jalan, anggaran yang dikeluarkan dapat mencapai Rp12 miliar mengingat kondisi ataupun akses yang cukup berat.

Kedua, JTP hanya menghubungkan antar kabupaten dan kota sehingga manfaatnya kurang dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar,

sedangkan jalan yang menghubungkan antar kampung dan distrik masih banyak yang belum layak untuk dilalui. Padahal jalan antar kampung dan distrik justru sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang berbagai kegiatan usaha, seperti mendistribusikan hasil perkebunan dan peternakan ke pasar.

Ketiga, pembangunan JTP berpotensi mengancam perekonomian masyarakat Papua setempat. Dengan kemudahan akses tersebut, akan memberikan peluang masuknya hasil pertanian dan peternakan dari masyarakat luar Papua, sehingga hasil pertanian dan peternakan orang asli/masyarakat Papua setempat menjadi terancam.

Keempat, pembangunan JTP menjadi akses untuk mengeksploitasi SDA dan merusak lingkungan, mengingat pembangunan jalan melalui akses Kawasan hutan lindung (Taman Nasional Lorentz Papua). Selama pembangunan JTP, masih adanya sejumlah tindakan *illegal logging* di beberapa tempat, bahkan banyak kamp kayu hasil penebangan kearah sekitar Taman Nasional Lorentz Papua. Selain itu Taman Nasional Lorentz juga menjadi sorotan UNESCO, karena dalam pembangunan JTP melewati taman nasional pada ruas Wamena-Habema-Kenyam¹, yang berpotensi untuk memberi dampak pada habitat dan perlindungan alamnya. Akibat proyek infrastruktur tersebut, UNESCO juga mendesak pemerintah Indonesia agar memberikan detail pembangunan dan peninjauan berbagai proyek yang dituangkan dalam keputusan Komite Warisan Dunia.

Kelima, sektor keamanan. Kondisi daerah yang sampai saat ini masih dilanda konflik yang mengancam keamanan pekerja JTP, dimana penembakan terhadap pekerja berulang kali terjadi. Konflik terjadi akibat ruas JTP melewati hutan adat dan hutan lindung.

¹Dalam situs KLHK disebutkan bahwa JTP khususnya ruas Wamena-Habema-Kenyam memiliki total panjang jalan sepanjang 284,4 km, sementara akses pembangunan jalan yang melintasi kawasan Taman Nasional Lorentz yakni sepanjang 178,3 km

Rekomendasi

Secara keseluruhan permasalahan yang terjadi pada JTP adalah permasalahan yang bersinggungan dengan anggaran, kerusakan lingkungan dan keamanan dari proses pembangunan JTP itu sendiri. Agar pembangunan JTP dapat lebih optimal, terdapat beberapa poin yang dapat dilakukan pemerintah, antara lain: **pertama**, pemerintah harus menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk membangun JTP kedepan. Dalam membangun JTP, jalan yang sudah terhubung tidak dapat terlalu lama dibiarkan dalam kondisi pengerasan jalan tanah, karena buruknya cuaca yang terjadi di pegunungan Papua mengakibatkan pengerasan jalan tanah tersebut kembali menjadi jalan yang berupa tanah biasa. Pembangunan akan terus berulang jika dalam pembangunannya terlalu lama dibiarkan. Dalam pembangunan JTP pemerintah juga harus memperhatikan kualitas dan keamanan pembangunan, mulai dari pembukaan jalan, jalan tanah, pengerasan jalan tanah hingga pengaspalan, mengingat JTP ini menjadi jalan utama pengiriman logistik yang akan dilalui kendaraan bermuatan besar. **Kedua**, selain pembangunan JTP yang menghubungkan kabupaten/kota dan provinsi, pemerintah juga harus membangun dan memperbaiki jalan yang menghubungkan antar kampung dan distrik di Papua. Kemudian pemerintah juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti pemerintah setempat dan pelaku ekonomi agar pembangunannya memiliki manfaat ekonomi. **Ketiga**, pemerintah perlu memperhatikan pembangunan JTP agar tidak menjadi akses untuk oknum-oknum yang akan melakukan perusakan lingkungan. Selain itu juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pihak keamanan untuk menindak dan menjaga agar perusakan lingkungan tidak kembali terulang. **Keempat**, konflik yang terjadi di Papua merupakan masalah yang kompleks, permasalahan ini bukan hanya terjadi di proyek JTP, namun juga di pemukiman dan pertambangan di Papua. Pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang humanis melalui dialog dalam menyelesaikan konflik, yakni melalui dialog kepada seluruh elemen masyarakat baik tokoh masyarakat adat, agama, maupun pihak keamanan (TNI dan Polri) dalam memastikan dan membantu menjaga keamanan para pekerja pembangunan JTP.

Daftar Pustaka

Betahita.id. 2021. Menelusuri Kondisi Proyek Jalan Trans Papua Via Data. Diakses Dari: <https://betahita.id/news/lipsus/6327/menelusuri-kondisi-proyek-jalan-trans-papua-via-data.html?v=1625902272> pada tanggal 13 November 2021.

Bisnis.com. 2021. Ini Alasan Pekerjaan Jalan Trans Papua Tidak Capai Target. Diakses Dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210902/45/1437162/ini-alasan-pekerjaan-jalan-trans-papua-tidak-capai-target> pada tanggal 12 November 2021.

BPS. 2021. Indeks Kemahalan Konstruksi 2019-2021. Diakses Dari: <https://www.bps.go.id/indicator/4/128/1/>

[indeks-kemahalan-konstruksi.html](#) pada tanggal 25 November 2021.

Mongabay.com. 2020. Jalan Trans Papua Hampir Semua Terhubung, Dampak Bagi Orang Papua dan Lingkungan. Diakses Dari: <https://www.mongabay.co.id/2020/10/05/jalan-trans-papua-hampir-semua-terhubung-dampak-bagi-orang-papua-dan-lingkungan/> pada tanggal 12 November 2021.

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran



9 772502 868006